PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.5, Agustus 2025

Implementasi Integrasi Nasional di Tengah Keberagaman Budaya Masyarakat Sumatra Utara

Jonathan Brando Saragi[1], Albi Sutandi[2], Anggun Sibarani[3], Brigita Zai[4], Ian Josephan Saragih[5], Ogin Syaputra Sinaga[6], Sri Yunita[7]
[1,2,3,4,5,6,7]Fakultas Ekonomi/Universitas Negeri Medan
E-mail: jonathan.saragi2016@gmail.com

Article History:
Received: 02 Juli 2025
Revised: 13 Juli 2025
Accepted: 23 Juli 2025

Keywords: *Integrasi Nasional, Keberagaman budaya, Sumatra Utara.*

Abstract: *Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama, yang di satu sisi menjadi kekuatan bangsa, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola secara bijak. Provinsi Sumatra Utara sebagai miniatur keberagaman Indonesia menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan integrasi nasional di tengah kehidupan masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi nasional diterapkan di tengah keberagaman budaya masyarakat Sumatra Utara serta mengidentifikasi solusi terhadap hambatan yang ada. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa integrasi nasional di wilayah tersebut masih terhambat oleh prasangka etnis, lemahnya pendidikan multikultural, ketimpangan sosial-ekonomi, dan minimnya ruang dialog antarbudaya. Solusi yang ditawarkan meliputi penguatan nilai-nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan berbasis kontekstual, pemerataan pembangunan, literasi digital, serta pemberdayaan budaya lokal sebagai pengikat identitas nasional.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, etnis, agama, dan bahasa yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia hidup dalam keragaman yang kompleks namun menyatu dalam satu identitas kebangsaan: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa, namun juga sekaligus menjadi tantangan serius dalam menjaga integrasi nasional, yaitu proses menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda ke dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis dan stabil.

Salah satu provinsi yang menjadi miniatur keberagaman Indonesia adalah Sumatra Utara. Provinsi ini dihuni oleh berbagai suku seperti Batak (dengan sub-suku Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak), Melayu, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, dan lainnya. Interaksi antaretnis dan antaragama dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi bagian dari dinamika masyarakat di kota-kota seperti Medan, Pematang Siantar, dan sekitarnya. Keberagaman ini menciptakan kekayaan budaya yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga rentan menimbulkan konflik jika tidak dikelola secara adil dan bijaksana.

Dalam praktiknya, implementasi integrasi nasional di Sumatra Utara masih menghadapi

berbagai kendala. Meskipun secara formal negara menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di tingkat masyarakat masih sering muncul prasangka etnis, diskriminasi sosial, konflik antar kelompok, serta kecenderungan untuk memprioritaskan identitas kesukuan atau agama di atas identitas nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses integrasi belum sepenuhnya terwujud secara merata dalam praktik sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan, baik di lembaga pendidikan formal maupun dalam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap konsep integrasi nasional sering kali masih sebatas teori, tanpa diiringi pengamalan nyata dalam kehidupan multikultural. Minimnya pendidikan multikultural, kurangnya ruang dialog antarbudaya, serta lemahnya pengawasan terhadap ujaran kebencian di media sosial menjadi penghambat utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran.

Keberagaman yang tidak dibarengi dengan pemahaman lintas budaya dan semangat nasionalisme yang kuat berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial. Jadi, perlu dikaji secara lebih mendalam bagaimana integrasi nasional diimplementasikan dalam masyarakat Sumatra Utara, apa saja tantangan yang dihadapi, serta peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan dan aktor lokal dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan.

LANDASAN TEORI

Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan suatu proses dinamis dalam menyatukan berbagai kelompok sosial, etnis, agama, dan budaya ke dalam satu sistem nasional yang utuh. Dalam konteks negara Indonesia yang majemuk, integrasi nasional menjadi syarat mutlak untuk menjaga stabilitas, keberlangsungan, dan kedaulatan negara. Menurut Soekanto (2010), integrasi nasional adalah upaya mempersatukan perbedaan-perbedaan sosial budaya ke dalam satu kesatuan bangsa, yang mencakup aspek psikologis (rasa memiliki satu identitas), politis (kesamaan tujuan berbangsa), dan struktural (keberadaan institusi negara).

Lalu, Budimansyah dan Suryadi (2008) menyatakan bahwa integrasi nasional bukan hanya tentang kesatuan wilayah secara geografis, tetapi juga melibatkan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat, termasuk nilai persatuan, solidaritas sosial, keadilan, dan musyawarah. Dalam pendidikan kewarganegaraan, integrasi nasional diajarkan melalui pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Konsep integrasi juga melibatkan kemampuan negara dalam mengakomodasi keberagaman melalui sistem politik dan sosial yang inklusif. Apabila kelompok-kelompok masyarakat merasa tersisih, hal ini dapat memicu konflik dan mengancam keutuhan nasional (Abdillah, 2011).

Keberagaman

Keberagaman merupakan karakter mendasar bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat heterogenitas tinggi, baik dalam hal etnis, bahasa, agama, adat, dan sistem nilai. Keberagaman ini harus dilihat sebagai aset bangsa, bukan ancaman, asalkan dikelola dengan pendekatan yang inklusif.

Koentjaraningrat (2009) mengungkapkan bahwa setiap suku bangsa memiliki unsur budaya khas, yang mencakup bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan, sistem teknologi, dan kesenian. Di Indonesia, keberagaman ini tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Sumatra Utara, yang menjadi rumah bagi suku Batak, Melayu, Mandailing, Tionghoa, dan lainnya.

Sairin (2002) menekankan bahwa keberagaman yang tidak disertai pemahaman lintas budaya dan penghargaan terhadap perbedaan akan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ia menyarankan perlunya pendekatan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional,

agar masyarakat memahami pentingnya toleransi, empati, dan solidaritas antar kelompok.

Budaya dan Identitas Nasional

Budaya merupakan ekspresi nilai dan identitas suatu kelompok sosial. Budaya tidak hanya menjadi alat pengenal suatu komunitas, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, budaya lokal harus diberdayakan dalam koridor nasionalisme agar mampu menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah.

Sedyawati (2006) menyatakan bahwa budaya lokal dapat memperkaya nasionalisme apabila ditempatkan sebagai bagian dari kebudayaan nasional, bukan sebagai entitas yang terpisah. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kultural dalam pembangunan nasional agar masyarakat tidak merasa kehilangan jati diri ketika menghadapi modernisasi dan globalisasi.

Tilaar (2004) menambahkan bahwa pendidikan adalah alat yang efektif untuk membangun kesadaran budaya dan nasionalisme. Melalui pendidikan multikultural, peserta didik dapat memahami dan menghargai keberagaman serta menyadari pentingnya solidaritas nasional. Pendidikan yang tidak sensitif terhadap budaya lokal cenderung menciptakan alienasi kultural dan memperkuat konflik identitas.

Hubungan Antara Integrasi Nasional, Keberagaman, dan Budaya

Hubungan antara integrasi nasional, keberagaman, dan budaya sangat erat. Tanpa pemahaman budaya yang baik, keberagaman dapat menjadi sumber disintegrasi. Sebaliknya, budaya yang dikelola secara inklusif dapat memperkuat integrasi nasional. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu instrumen penting untuk menjembatani keberagaman tersebut.

Integrasi nasional di masyarakat multikultural seperti di Sumatra Utara membutuhkan pendekatan lintas budaya yang mengakui dan menghormati perbedaan. Dalam hal ini, konsep multikulturalisme yang diusung oleh Tilaar (2004) dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci keberhasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau kajian pustaka, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep penting seperti integrasi nasional, keberagaman budaya, dan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat multikultural, khususnya di wilayah Sumatra Utara.

Menurut Zed & Mohammad (2004), studi literatur adalah suatu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti dari berbagai literatur yang tersedia. Metode ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan landasan teoritis dan menyusun kerangka konseptual dari suatu kajian ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sumatra Utara merupakan salah satu wilayah yang merepresentasikan keberagaman budaya Indonesia secara nyata. Masyarakat di wilayah ini hidup berdampingan dalam lingkungan multietnis yang kompleks, terdiri dari Batak Toba, Karo, Mandailing, Melayu, Simalungun, Pakpak, Tionghoa, Jawa, dan lainnya. Keberagaman ini memang memperkaya khazanah budaya nasional, namun juga menyimpan potensi ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik. Sejumlah persoalan seperti prasangka etnis, diskriminasi sosial, pengutamaan identitas kesukuan, serta lemahnya kesadaran terhadap identitas nasional masih menjadi tantangan dalam proses integrasi nasional di wilayah ini.

Melalui studi literatur terhadap berbagai sumber, termasuk jurnal Septria Sa'duh & Sasmi Nelwati (2024), diperoleh pemahaman bahwa keberhasilan integrasi nasional sangat dipengaruhi oleh upaya kolektif yang menyentuh aspek ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Pendekatan sektoral tidak cukup untuk mengatasi tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Oleh karena itu, integrasi nasional harus dibangun melalui strategi lintas sektor yang saling terhubung dan saling memperkuat.

Salah satu akar persoalan yang menghambat integrasi di Sumatra Utara adalah masih rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat masih menempatkan identitas kesukuan atau kelompok di atas identitas kebangsaan. Untuk menjawab hal ini, penguatan pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah strategis. Pendidikan tidak hanya harus memberikan pengetahuan normatif tentang negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara aplikatif. Seperti yang ditegaskan oleh Pahlevi (2017), internalisasi nilai Pancasila melalui pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif dapat membentuk karakter warga negara yang inklusif dan toleran.

Pendidikan kewarganegaraan yang berbasis multikultural sangat diperlukan, khususnya di daerah dengan tingkat heterogenitas tinggi seperti Sumatra Utara. Dalam hal ini, institusi pendidikan harus mengembangkan kurikulum yang tidak hanya menyampaikan wawasan kebangsaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran. Misalnya, mengangkat kearifan budaya seperti "Dalihan Na Tolu" dari Batak yang menekankan harmoni sosial dan penghormatan antar manusia, untuk disandingkan dengan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai bagian dari penguatan identitas nasional.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya ruang dialog antarbudaya di masyarakat. Akibatnya, prasangka dan stereotipe negatif antar kelompok etnis masih sering terjadi. Untuk mengatasi ini, diperlukan inisiatif pembentukan forum-forum komunikasi antarwarga yang bersifat inklusif, seperti forum lintas agama, kegiatan budaya bersama, atau diskusi rutin antar pemuda lintas suku. Sa'duh & Nelwati (2024) juga menekankan pentingnya kerja sama antar kelompok sebagai salah satu instrumen utama memperkuat integrasi.

Masalah kesenjangan sosial dan ekonomi juga berkontribusi terhadap melemahnya kohesi sosial. Ketimpangan pembangunan antardaerah dalam satu provinsi, seperti antara wilayah pedalaman dengan kota besar seperti Medan, dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada disintegrasi. Oleh karena itu, integrasi nasional harus diiringi dengan kebijakan pembangunan yang adil dan merata. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja tersebar secara seimbang di semua wilayah. Panjaitan (2000) menegaskan bahwa pemberdayaan kelompok rentan menjadi indikator penting dari keberhasilan pembangunan yang inklusif.

Selain itu, tantangan integrasi juga muncul dalam bentuk ujaran kebencian di media sosial. Perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan literasi digital menyebabkan penyebaran konten yang memecah belah semakin masif. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah peningkatan literasi media dan pendidikan digital yang berbasis etika kebangsaan. Kegiatan pelatihan atau kampanye anti-ujaran kebencian dapat dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas digital, kampus, dan organisasi masyarakat sipil.

Lembaga pemerintah dan masyarakat sipil memiliki peran yang sangat strategis. Program-program seperti pelatihan toleransi, kampanye damai, serta kegiatan gotong royong lintas komunitas perlu digalakkan kembali untuk membangun kohesi sosial dari akar rumput. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri—perlu kolaborasi horizontal antara warga, pemuda, tokoh adat, dan lembaga keagamaan untuk menjaga dan merawat persatuan di tengah keberagaman.

Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial yang menyatakan

bahwa identitas nasional terbentuk melalui pengalaman interaksi sosial, bukan sekadar hafalan konsep. Artinya, integrasi nasional harus dibentuk melalui perjumpaan yang nyata antar masyarakat, bukan sekadar slogan di ruang kelas atau media.

Berdasarkan pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional di Sumatra Utara tidak hanya merupakan tanggung jawab negara secara struktural, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Solusi terhadap permasalahan integrasi harus bersifat sistemik, kontekstual, dan berkelanjutan, mulai dari dunia pendidikan, kebijakan publik, ruang sosial, hingga platform digital. Melalui pendekatan yang menyeluruh, integrasi nasional di tengah keberagaman budaya bukan hanya sebuah ideal, tetapi menjadi realitas yang dapat dicapai. (Times

KESIMPULAN

Integrasi nasional merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Di Provinsi Sumatra Utara, keberagaman etnis, budaya, dan agama menjadi potensi besar sekaligus tantangan nyata. Persoalan seperti prasangka antaretnis, diskriminasi sosial, dan lemahnya penghayatan terhadap identitas nasional menunjukkan bahwa implementasi integrasi nasional belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh yang menyentuh aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nasional dapat diperkuat melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan multikultural, pembukaan ruang dialog antarbudaya, pemerataan pembangunan yang adil, serta pemberdayaan budaya lokal sebagai instrumen pemersatu bangsa. Peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, terutama lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat yang sangat diperlukan agar integrasi nasional tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud sebagai praktik sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat multikultural seperti di Sumatra Utara.

DAFTAR REFERENSI

Abdillah, M. (2011). *Integrasi Sosial dan Multikulturalisme di Indonesia.* Jakarta: Paramadina.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Memperkokoh Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*, 65–81.

Panjaitan, M. (2000). *Memberdayakan Kaum Miskin.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Sairin, S. (2002). *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Multikultural.* Yogyakarta: Kanisius.

Sedyawati, E. (2006). *Budaya dalam Perspektif Nasional.* Jakarta: Balai Pustaka.

Septria Sa'duh, S. N. (2024). Memperkuat Integrasi Nasional di Tengah Keberagaman Indonesia. *Inspiraasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahas*, 201-207.

Soekanto, S. (2010). *Sosiologi: Suatu Pengantar.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suryadi, D. B. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi.* Bandung: Widya Aksara Press.

Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional.* Jakarta: Grasindo.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.